
Analisis Kebijakan Pengendalian Internal Persediaan Obat di Instalasi Farmasi RSUD Waluyo Jati Kraksaan

Astutik¹, Ernani Hadiyati², Umi Muawanah³

^{1,2,3}Universitas Gajayana Malang

E-mail: tutikastutik309@gmail.com¹, ernani_hadiyati@unigamalang.ac.id²,
umimuawanah@unigamalang.ac.id³

Article History:

Received: 02 September 2022

Revised: 18 September 2022

Accepted: 19 September 2022

Kata Kunci : SPI, SPIP,
Kebijakan Pengendalian
Internal, Persediaan Obat

Abstrak: Penelitian ini berfokus pada Analisis Kebijakan pengendalian Internal Persediaan Obat di Instalasi farmasi RSUD Waluyo Jati. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, studi kasus pada RSUD Waluyo Jati Kraksaan dengan mengevaluasi Kebijakan pengendalian internal persediaan Obat Instalasi farmasi. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Pemilihan Responden dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan pengendalian internal persediaan Obat Instalasi farmasi di RSUD RSUD Waluyo Jati Kraksaan telah melaksanakan praktek Kebijakan pengendalian internal dan belum terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas kebijakan pengendalian internal dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Kebijakan pengendalian Internal bertujuan sebagai alat untuk mengawasi proses Kebijakan pengendalian Internal pada persediaan Obat Instalasi farmasi sehingga tujuan Rumah Sakit dapat tercapai. Penelitian ini merupakan penelitian pertama yang dilakukan pada pengelolaan persediaan farmasi di RSUD Waluyo Jati Kraksaan dengan menggunakan kerangka kerja SPIP.

PENDAHULUAN

Manajemen kebijakan Pengendalian Internal terhadap persediaan berfungsi untuk mengelola dan mengendalikan resiko dengan baik sehingga tercipta kegiatan operasional yang sehat dan aman. Komponen ini meliputi seluruh kebijakan dan prosedur di seluruh fungsi operasional yang bertujuan untuk melindungi aset. Pengendalian persediaan dapat dikatakan efektif apabila di dalamnya telah diterapkan unsur – unsur Pengendalian Internal yang saling berhubungan satu sama lain untuk menghasilkan informasi persediaan yang ada di gudang dengan baik.

Salah satu pengendalian yang diperlukan adalah Sistem Kebijakan Pengendalian Internal Persediaan Obat Rumah Sakit, obat Rumah Sakit merupakan pengeluaran dan pemasukan yang paling lancar dan hampir setiap hari terjadi Pelayanan Obat Di Instalasi farmasi, Anggaran Belanja Obat di Rumah Sakit merupakan komponen terbesar dari pengeluaran rumah sakit. Belanja Obat di Rumah Sakit dapat menyerap sekitar 40 s.d 50% dari biaya keseluruhan Rumah Sakit. Biaya yang besar tersebut tentunya harus dikelola dengan efektif dan efisien, mengingat dana untuk pembelian Obat di Rumah Sakit tidak selalu sesuai dengan kebutuhan. sehingga sering terjadi penyalahgunaan dan mudah digelapkan. Manajemen harus menetapkan tanggung jawab secara jelas dan tiap orang memiliki tanggung jawab untuk tugas yang diberikan. Kebijakan Pengendalian Internal yang baik terhadap Operasional memerlukan prosedur yang memadai untuk melindungi penerimaan kas. Kegiatan pengadaan barang dan jasa, panitia pengadaan barang dan jasa/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Unit layanan pengadaan yang dibentuk oleh pengguna anggaran bertanggung jawab untuk melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa sampai dengan penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa. Oleh karena banyaknya tahapan yang harus dilalui, maka kegiatan pengadaan barang/jasa tergolong kompleks dan rawan dengan masalah yang dihadapi seperti investasi, ketidakpuasan peserta lelang, sampai dengan proses pemeriksaan dugaan korupsi.

Keterlambatan pembayaran mengakibatkan kekosongan ketersediaan stok Obat Di Instalasi Farmasi RSUD Waluyo Jati Kraksaan, Keterlambatan pembayaran oleh Rumah Sakit bukan dikarenakan ketidakmampuan rumah sakit untuk membayar namun lebih karena waktu dalam proses administrasi di rumah sakit membutuhkan proses yang panjang dan pihak rekanan/distributor yang mengirimkan kelengkapan dokumen persyaratan pembayaran mendekati waktu jatuh tempo. Rumah Sakit memiliki utang kepada distributor yang belum dilunasi sesuai dengan tempo perjanjian yang disepakati, ataupun diakibatkan karena kekosongan obat yang terjadi pada distributor dan terlambatnya Relasi Distributor dalam penyaluran meskipun Rumah Sakit telah melakukan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) pada tahap perencanaan Belanja Ketersediaan Obat. Hal tersebut dapat menyebabkan keterlambatan dalam pemberian obat kepada pasien, dimana pasien diminta untuk menunggu atau membeli obat di luar Rumah Sakit.

Berdasarkan data sistem RS per 21 Mei 2021 dari total 423 jenis obat sebanyak 59,81% obat belum datang, disebabkan 17 Penyedia obat yang lock distributor, jadi hal tersebut yang menyebabkan stock di gudang farmasi sebanyak 279 jenis obat kosong. Kekosongan obat dikarenakan masa jatuh tempo pelunasan pembayaran obat selama 1 – 2 bulan yang sudah disepakati dalam perjanjian kerjasama kedua belah pihak, dan pembayaran obat terakhir hanya sampai faktur bulan Januari 2021, data total tagihan obat yang masih belum terbayar mulai bulan Januari s/d Mei 2021 bisa dilihat pada rekap data dari Kepala Instalasi Farmasi per Juni 2021 dibawah ini :

Tabel 1. Rekap data Sistem Instalasi Farmasi per Juni 2021

No	Bulan Faktur	Nilai Belanja Obat (Rp.)	Status	Posisi SPJ	Terbayar (Rp.)
1	Januari	599.841.571	Terbayar 28 Juni 2021	Keuangan	599.841.571
2	Februari	325.985.430	Terbayar Sebagian 28 Juni 2021	Keuangan	76.768.637
3	Maret	237.643.325	Belum terbayar	Keuangan	
4	April	293.912.612	Belum terbayar	Keuangan	
5	Mei	489.558.519	Belum terbayar	Proses	
6	Total	1.946.941.457			

Demi meningkatkan peluang dibayar tepat waktu, pastikan untuk mendiskusikan persyaratan dokumen pembayaran sebelum mendistribusikan produk atau layanan kepada pihak Rumah Sakit. Sebagian besar Pembayaran dilakukan dengan cara melengkapi terlebih dahulu persyaratan pembayaran sebelum ditetapkannya jatuh tempo penagihan biar tdk terjadi kekosongan stok obat dan tidak bisa order (*lock*). Ada beberapa alasan umum Rumah sakit telat membayar persediaan obat yaitu keterlambatan penyerahan dokumen persyaratan pembayaran dari distributor, ada revisi beberapa persyaratan penagihan, ada retur barang yang tdk sesuai pesanan, kurangnya komunikasi antara pihak distributor dan pihak rumah sakit karena kendala jarak dan waktu.

Distributor obat atau pedagang besar farmasi, yang selanjutnya disingkat PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan, penyimpanan dan penyaluran perbekalan farmasi dalam jumlah kecil maupun jumlah besar sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku adalah PBF. Pedagang besar farmasi dapat menyalurkan perbekalan farmasi ke Apotek, Rumah Sakit, atau unit pelayanan kesehatan lainnya yang ditetapkan Menteri Kesehatan.

Salah satu cara untuk mengembalikan akuntabilitas pemerintah adalah dengan meningkatkan kualitas kebijakan pengendalian internal (*internal control*) dalam melaksanakan pembayaran belanja obat farmasi. Kebijakan Pengendalian internal merupakan pagar yang strategis dan penting agar kegiatan pengadaan Belanja Obat dapat terhindar dan bahkan mencegah secara dini terjadinya kesalahan, penyelewengan, penyimpangan, ketidak tertiban, dan ketidak patuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Kebutuhan obat dan Pengendalian Persediaan obat di Rumah Sakit diharapkan dapat menjadi acuan bagi Instalasi Farmasi Rumah Sakit dalam merencanakan kebutuhan dan mengendalikan persediaan obat serta dapat dipergunakan oleh pihak Manajemen Di Rumah Sakit dalam pengendalian biaya obat dan pemenuhan kebutuhan obat. Adapun persyaratan Proses pembayaran Pengadaan Barang / Jasa pada Rumah sakit umum daerah yang tertuang dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor : 13 tahun 2015 tentang jenjang nilai pengadaan barang/jasa para Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo jati kraksaan sebagai perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan daerah (BLUD) di kabupaten probolinggo yang dibantu pelaksanaannya oleh Staf Struktural Rumah Sakit dalam rangka menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pembantu Pelaksana kegiatan (Pembuat berkas dan kelengkapan Dokumen Penagihan) untuk Kelancaran Pembayaran Belanja Persediaan Obat, akan tetapi berbagai keadaan menunjukkan kurangnya keberhasilan Target Pelunasan Belanja Obat. Kegiatan utama sebuah rumah sakit adalah menjual jasa perawatan, namun perawatan terhadap pasien tidak akan maksimal jika persediaan obat yang dimiliki Rumah Sakit tersebut tidak lengkap. Persediaan obat dalam suatu Rumah Sakit memiliki arti yang sangat penting karena persediaan obat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan suatu Rumah Sakit. Oleh karena itu, perlakuan Manajemen Rumah sakit sangat berperan penting dalam persediaan obat dan harus diterapkan oleh pihak Rumah Sakit untuk membantu kelancaran dalam kegiatan Pembayaran Belanja Instalasi Farmasi. Tanpa adanya persediaan Obat Rumah Sakit akan dihadapkan pada resiko tidak dapat memenuhi kebutuhan Pasien sehingga menurunkan kualitas dari rumah sakit dan menurunkan pendapatan dari Rumah Sakit, selain itu dapat berpengaruh pada mutu pelayanan kepada pasien, perawatan tertunda dan keluhan pasien.

LANDASAN TEORI

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, diperlukan suatu Sistem Pengendalian Internal yang memadai. Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasal 2 ayat (3) menyebutkan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 3 (1) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, SPIP terdiri dari lima unsur, antara lain :

- a. Lingkungan pengendalian
- b. Penilaian risiko
- c. Kegiatan pengendalian
- d. Informasi dan komunikasi
- e. Pemantauan

Kebijakan Internal

Kebijakan adalah Suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau Pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu serta mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Kebijakan Internal adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh Pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat, kebijaksanaan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat aparatur Pemerintah. Keterbatasan Kebijakan Internal antara lain:

- a. Persekongkolan (Kolusi)
- b. Perubahan
- c. Kelemahan Manusia
- d. Asas biaya manfaat

Pengendalian Internal

Pengendalian Internal adalah sebagai proses yang diimplementasikan oleh Dewan Pengawas, pihak Manajemen (Direktur dan Satuan Pengawas Internal) dan mereka yang berada di bawah arah keduanya untuk memberi jaminan yang wajar, kemungkinan kesalahan manusia, kolusi, dan penolakan Manajemen atas Pengendalian, membuat proses ini menjadi tidak sempurna, Pengendalian internal dapat menjadi faktor penting agar suatu sistem dapat berjalan dengan efektif. Hal ini karena Pengendalian Internal dapat memenuhi fungsi sistem informasi akuntansi menyangkut adanya pengendalian yang memadai untuk pengamanan aset data. Pengendalian Internal merupakan bagian yang sangat penting agar tujuan dapat tercapai. Pengendalian internal memberikan dampak yang positif terhadap Rumah Sakit, sebaliknya Rumah Sakit tanpa

pengendalian internal tujuan Rumah Sakit tidak dapat dicapai secara efektif dan efisien. Tugas Satuan Pengawas Internal (SPI):

- a. Menyiapkan rencana kerja kegiatan Pengendalian Internal.
- b. Menyiapkan pedoman Sistem Pengendalian Internal.
- c. Sosialisasi penerapan Sistem Pengendalian Internal.
- d. Melaksanakan pengendalian kegiatan.
- e. Membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan pengendalian internal

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif (*case study*). Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi aktual dan akurat mengenai fakta- fakta, sifat, dan hubungan antar kejadian yang diteliti dengan cara mengumpulkan, mengklarifikasikan, menyajikan serta menganalisis data dan informasi yang didapat, yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti (Mulyadi, 2011). Penelitian kualitatif meliputi susunan teknik interpretasi yang berusaha untuk menggambarkan, memberi kode, menerjemahkan suatu fenomena. Bukan frekuensi dari fenomena yang sering atau jarang terjadi, penelitian kualitatif ini berusaha untuk mencapai pemahaman mendalam dari sebuah situasi (Cooper dan Schindler, 2017). Penelitian kualitatif juga diartikan sebagai sarana untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang berkaitan dengan masalah sosial atau manusia (Crewell, 2009). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, kuesioner, penelaah dokumen dan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan para Informan dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2. Hasil Wawancara

Informan	Kutipan Wawancara
1. Lingkungan pengendalian	
a. Penegakan Integritas dan Nilai Etika	
Apakah seluruh Unit yang berkaitan dengan Pengadaan Barang Jasa sudah mengetahui, memahami isi aturan perilaku/standar etika, sanksi hukuman terhadap pelanggaran aturan perilaku/standar etika?	
Pimpinan SPI	Itu sudah kita laksanakan, sudah ada kode etik itu sudah beberapa dari kita kena sanksi, seluruh Unit yang berkaitan dengan Pengadaan Barang Jasa sudah mengetahui, memahami isi aturan perilaku/standar etika, sanksi hukuman terhadap pelanggaran aturan perilaku/standar etika.
b. Komitmen Terhadap Kompetensi	
Apakah ada menyelenggarakan program pelatihan dan pembimbingan yang berkesinambungan, dan melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa seluruh pejabat Pengadaan Barang jasa sudah menerima pelatihan yang sesuai dengan pelaksanaan tugasnya?	
Staf PPTK Ruang Kepegawaian	Tiap tahun kita bikin diklat terkait dengan pengelolaan keuangan dan barang jasa, nah itu komitmen gitukan itu tiap tahun kita menyelenggarakan program pelatihan dan pembimbingan yang berkesinambungan, dan melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa seluruh pegawai sudah menerima pelatihan yang sesuai dengan pelaksanaan tugasnya.
c. Kepemimpinan yang Kondusif	
Apakah Direktur Rumah Sakit mempunyai komitmen kuat terhadap fungsi tertentu dalam penerapan SPIP seperti fungsi pencatatan dan pelaporan keuangan, dan penyempurnaannya, pengelolaan pegawai, pengawasan internal	

maupun eksternal?	
Kepala Bidang Penunjang	Aktivitas Kebijakan Pengendalian Internal Spi sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan: a) Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan; b) Menerapkan manajemen berbasis kinerja; c) Mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP; d) Melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah; e) Melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah; dan f) Merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.
d. Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai Dengan Kebutuhan	
Adakah struktur organisasi RSUD Waluyo Jati kebijakan pengendalian internalnya bukan struktur organisasi secara keseluruhan ?	
Staf SPI	Terdapat Kebijakan Pengendalian Internal yang memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan internal dalam Instansi RSUD Waluyo Jati, untuk memudahkan Pimpinan SPI memperoleh informasi pelaksanaan tugas tanggung jawabnya, saling berkomunikasi, serta pemahaman pegawai terhadap hubungan dan jenjang pelaporan yang telah ditetapkan
e. Pendelegasian Wewenang Dan Tanggung Jawab yang Tepat	
Apakah Direktur Sudah memeberikan wewenang Dan Tanggung Jawab kepada bawahannya secara tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya masing-masing?	
Staf Kepegawaian	wewenang telah diberikan secara tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya masing-masing, baik pimpinan maupun staf melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai yang diberikan Direktur
f. Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	
Apakah ada audit dr Pemerintah Daerah turun langsung kebawah melakukan pengawasan melakukan monitoring, bagaimana penerimaan bagaimana, pelaksanaan kegiatan, bagaimana penggunaan barang-barang Belanja rumah sakit?	
Pejabat Pengadaan	Tiap tahun selalu ada dari pemerintah Daerah / Inspektorat melakukan control terhadap pelaksanaan kegiatan RSUD Waluyo Jati, melakukan pengawasan melakukan monitoring, yang harus dilaksanakan dalam konteks SPI, RSUD waluyo jati sudah mempunyai mekanisme untuk memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit, serta melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan koridor SPI.
g. Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	
Apakah Rumah Sakit selalu berhubungan dengan APIP Aparat pemeriksa internal pemerintah?	
	Direktur RSUD Waluyo Jati telah melakukan hubungan kerja yang baik dengan SPI yang melakukan Pengawasan anggaran, akuntansi dan perbendaharaan, dan yang melaksanakan tanggung jawab Kebijakan pengendalian Internal Semua aktivitas Rumah Sakit, sehingga tercipta mekanisme saling uji dan saling berkoordinasi dan selalu berhubungan dengan SPIP Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (Inspektorat, BPKP, dan BPK).
2. Penilaian Risiko	
Apakah tiap Unit Instansi memiliki mekanisme antisipasi, identifikasi, dan reaksi terhadap segala bentuk kesalahan pelaporan?	
Kepala Instalasi Farmasi	Jadi resikonya disini ini banyak terutama resiko dalam hal penerimaan pendapatan tapi itu sudah bisa diminimalisir dengan lewat sistem penerimaan Hasil Pekerjaan, disitu kita bisa tau oh disitu ada penyimpangan nah itu sudah bisa kita control itu dari sisi penerimaan trus kalau dari sisi pelaksanaan kegiatan resikonya misalnya mereka membuat kayak laporanya tidak sesuai dengan yang diharapkan nah itu banyak tapikan disini kita control trus ini loh yang kurang ini gitu itu untuk mengantisipasi resiko.
3. Kegiatan Pengendalian	
Bagaimana cara Rumah sakit mengontrol semua aktivitas kegiatannya?	
Kepala Kepegawaian	Nah itu kita ada system disini, semuanya terkofer dengan jelas itu dari 24 semua aktivitas Rumah Sakit masuk disini dan selalu kami informasikan ke Direktur misalnya melalui kepegawaian mengenai misalnya kegiatan pengendalian umum pengamanan sistem informasi untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi yang memperhatikan: penetapan

	organisasi untuk implementasi, pemantauan efektivitas program pengamanan jadi gitu
4. Informasi dan komunikasi	
Bgaimana memastikan terjalannya komunikasi eksternal yang efektif?	
Kepala IT	Ya, dengan menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, antara lain berupa pedoman kebijakan dan prosedur, surat edaran Notulen rapat staf, laporan bulanan termasuk pula tindakan Direktur yang mendukung implementasi SPIP Informasi dari sumber internal yang relevan dengan tugas dan fungsi telah diperoleh dan disampaikan kepada Pimpinan SPI Dan Memastikan terjalannya komunikasi eksternal yang efektif, yaitu untuk mengetahui berfungsinya Kebijakan pengendalian internal dan meninformasikan mengenai kode etik yang berlaku dengan menggunakan berbagai bentuk dan sarana dalam mengkomunikasikan informasi penting, antara lain berupa buku pedoman kebijakan, prosedur, surat edaran, memorandum, papan pengumuman, situs internet dan intranet, rekaman video, e-mail dan arahan lisan kepada pegawai Rumah Sakit dan lainnya dan dukungan pimpinan Unit Instansi terhadap pengembangan teknologi informasi ditunjukkan dengan komitmennya dalam menyediakan pegawai dan pendanaan yang memadai terhadap upaya pengembangan tersebut
5. Pemantauan	
Apa sudah dilaksanakan Pemantauan sebagai proses menilai kualitas kinerja Kebijakan pengendalian internal?	
Staf SPI	Ya, sudah dilaksanakan adapun kegiatan monitoring/kontrol pengelolaan rutin terkait dalam pelaksanaan tugas baik oleh Direktur langsung maupun kontrol dalam bentuk koordinasi antar bidang untuk memberikan masukan-masukan, pemanggilan secara langsung oleh Direktur.

2. Lingkungan Pengendalian

a. Penegakan Perilaku dan Nilai Etika

Jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh informan menunjukkan dilingkungan RSUD Waluyo jati Kraksaan sudah mengetahui standar etika dan sanksi hukuman terhadap pelanggaran etika. Penegakan Perilaku dan nilai etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- 1) Menyusun dan menerapkan aturan perilaku
- 2) Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan Unit Instansi RSUD Waluyo jati Kraksaan
- 3) Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku
- 4) Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian Kebijakan pengendalian internal

Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis. RSUD Waluyo Jati Kraksaan dalam hal ini sudah memenuhi unsur lingkungan pengendalian dalam hal penegakan Perilaku dan nilai etika, dengan memberikan ketentuan yang relevan serta menunjukkan aturan perilaku yang ditetapkan dengan Standar etika hal tersebut tersebut dilakukan untuk mengetahui komitmen Unit Instansi pada unsure lingkungan pengendalian SPIP dalam hal tersebut akan mampu menciptakan lingkungan pengendalian yang konsisten terhadap unsur-unsur SPIP sehingga akan memberikan pengaruh yang baik terhadap kegiatan Kebijakan pengendalian Internal kedepan, karna lingkungan pengendalian yang baik akan mampu menciptakan kegiatan pengendalian yang efektif dan efisien.

b. Komitmen terhadap kompetensi

Jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh informan tersebut menunjukkan

sikap yang konsisten terhadap penyelenggaraan kegiatan yang dimana tujuan utamanya yakni meningkatkan kompetensi kinerja pegawainya. hal ini dapat memberikan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Rumah Sakit.

c. Kepemimpinan yang kondusif

Jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh informan menunjukkan pada RSUD Waluyo Jati memiliki komitmen kuat terhadap fungsi tertentu dalam penerapan SPIP seperti fungsi pencatatan dan pelaporan keuangan, dan penyempurnaannya, pengelolaan pegawai, pengawasan internal maupun eksternal. Kemudian dalam lingkungan pengendalian internal RSUD Waluyo Jati mendukung penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang konservatif, mengungkapkan semua informasi yang diperlukan, menghindari penekanan pencapaian hasil jangka pendek, tidak menyampaikan laporan yang tidak tepat, fakta tidak dibesar-besarkan, dan estimasi anggaran tidak ditinggikan, hal ini di buktikan dengan tidak terjadi mutasi pimpinan yang berlebihan berkaitan dengan masalah-masalah pengendalian internal, pegawai yang menduduki posisi penting tidak mengundurkan diri dengan alasan tidak terduga, tidak terdapat perputaran pegawai yang tinggi sehingga melemahkan pengendalian internal, tidak terjadi perputaran pegawai yang tidak berpola mengindikasikan kurangnya perhatian pimpinan Instansi Pemerintah terhadap pengendalian internal. Artinya dalam lingkungan pengendalian yang berkaitan dengan kepemimpinan yang kondusif RSUD Waluyo Jati telah memenuhi Unsur SPIP dengan komitmen tinggi dan relevan dengan Pasal 4 huruf c tentang kepemimpinan yang kondusif.

d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

Jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh informan menunjukkan Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sekurang-kurangnya dilakukan dengan menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi Pemerintah (RSUD Waluyo Jati Kraksaan), memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam Instansi Pemerintah(RSUD Waluyo Jati Kraksaan), memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan internal dalam Instansi Pemerintah(RSUD Waluyo Jati Kraksaan), melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis, menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan.

e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa hal seperti wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah (RSUD Waluyo Jati Kraksaan), pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam Instansi Pemerintah yang bersangkutan, pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP.

f. Perwujudan peran aparat pengawasan internal pemerintah yang efektif

Perwujudan peran aparat pengawasan internal pemerintah yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian

tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah Pemerintah (RSUD Waluyo Jati Kraksaan), memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah Pemerintah (RSUD Waluyo Jati Kraksaan), memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah Pemerintah (RSUD Waluyo Jati Kraksaan).

g. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait

Secara keseluruhan unsur lingkungan Kebijakan pengendalian Internal RSUD Waluyo Jati Kraksaan telah terintegrasi dan penerapannya sudah cukup memadai hal ini terlihat diantaranya lingkungan pengendalian terkait pada struktur organisasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan, sehingga pembatasan akses yang akan dilakukan telah memperhatikan struktur organisasi secara tepat. Unsur lingkungan Kebijakan pengendalian Internal terkait pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, agar pembatasan akses dapat dilakukan secara berjenjang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab. Unsur lingkungan Kebijakan pengendalian internal terkait komitmen pada kompetensi, agar delegasi wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada pegawai telah memperhatikan kompetensi pegawai yang ditunjuk. Unsur lingkungan Kebijakan pengendalian Internal terkait penegakan integritas dan nilai etika, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh petugas yang memiliki akses. Unsur Informasi dan komunikasi terkait dengan komunikasi internal, untuk mengkomunikasikan informasi atas efektivitas pembatasan akses. Unsur pemantauan terkait dengan pemantauan berkelanjutan, untuk memastikan bahwa pimpinan atau atasan telah memberikan pengarahan agar pembatasan akses dapat berjalan dengan efektif.

3. Penilaian Resiko

Jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh informan menunjukan unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam hal penilaian resiko di RSUD Waluyo Jati Kraksaan menunjukan masih membutuhkan tindak lanjut yang lebih mendalam mengenai strategi operasional yang konsisten mengenai rencana penilaian resiko. Langkah awal dalam mengelola resiko dengan baik adalah melakukan *Risk Assessment* (identifikasi dan evaluasi resiko yang melekat pada organisasi) sehingga menghasilkan daftar pemetaan dan kuantitas resiko serta daftar respon resiko. Namun, pada RSUD Waluyo Jati Kraksaan pelaksanaannya masih berupa mengenali resiko-resiko dan bagaimana cara mengatasinya dari hasil evaluasi kegiatan-kegiatan sebelumnya. Dalam unsur penilaian resiko RSUD Waluyo Jati Kraksaan perlu untuk mempertimbangkan penilaian atas faktor lain, yang dapat meningkatkan resiko yakni dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang terjadi di masa lalu (seperti kegagalan pencapaian misi, tujuan dan sasaran, pelanggaran penggunaan dana dan peraturan), serta resiko melekat pada misi dan sistem.

4. Kegiatan Pengendalian

Berdasarkan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh informan pada RSUD Waluyo Jati Kraksaan, terdapat kegiatan kebijakan pengendalian Internal umum pengamanan sistem informasi untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi yang memperhatikan: penetapan organisasi untuk implementasi, pemantauan efektivitas program pengamanan Kebijakan pengendalian Internal fisik atas aset. Direktur RSUD Waluyo Jati Kraksaan

menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang. Terdapat pemisahan fungsi yang menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang yang ditandai dengan pemisahan tanggung jawab dan tugas atas transaksi atau kejadian terkait dengan otorisasi, persetujuan, pemrosesan dan pencatatan, pembayaran atau penerimaan dana, revidu dan audit, serta fungsi-fungsi penyimpanan dan penanganan asset transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat segera dalam seluruh siklus transaksi atau kejadian. Direktur RSUD Waluyo Jati Kraksaan menyelenggarakan dokumentasi yang baik atas Sistem Kebijakan Pengendalian Internal serta transaksi dan kejadian penting dokumentasi yang baik atas Sistem Kebijakan Pengendalian Internal serta transaksi dan kejadian penting, yang diwujudkan dengan cara memiliki, pengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi tersebut.

5. Informasi dan komunikasi

RSUD Waluyo Jati Kraksaan, memastikan terjalinnya komunikasi eksternal yang efektif, yaitu untuk mengetahui berfungsinya Kebijakan pengendalian internal dan meninformasikan mengenai kode etik yang berlaku dengan menggunakan berbagai bentuk dan sarana dalam mengkomunikasikan informasi penting mengingat Informasi sebagai alat komunikasi yang efektif dengan tingkat akurasi yang tinggi yang disampaikan dalam laporan-laporan program/kegiatan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan perencanaan selanjutnya. Artinya suatu organisasi membutuhkan jalinan komunikasi yang intensif antar komponennya dengan informasi yang berkualitas. Sarana informasi dan komunikasi yang digunakan oleh RSUD Waluyo Jati Kraksaan sudah memenuhi unsur SPIP yang baik, namun demikian masih diperlukan adanya pembaharuan-pembaharuan dalam sistem informasi yang digunakan sehingga menciptakan informasi yang berkualitas dan terkomunikasikan dengan baik untuk dapat dilakukan pengambilan keputusan yang tepat.

6. Pemantauan

Pemantauan diselenggarakan melalui kegiatan monitoring/kontrol pengelolaan rutin terkait dalam pelaksanaan tugas baik oleh Direktur langsung maupun kontrol dalam bentuk koordinasi antar bidang untuk memberikan masukan-masukan, pemanggilan secara langsung oleh Direktur jika membutuhkan informasi terkait dengan permasalahan yang ada sehingga untuk meminimalisir penyimpangan dan efektifitas pencapaian tujuan visi dan misi Rumah Sakit. Pemantauan berkelanjutan, Evaluasi terpisah dan Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya oleh SPI.

Pembahasan

Analisis Kebijakan Pengendalian Internal Pemerintah pada Pelaksanaan Persediaan Obat Instalasi Farmasi RSUD Waluyo Jati Kraksaan

Berdasarkan hasil pernyataan kuesioner responden dan hasil wawancara dengan informan penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Pengendalian Internal Pemerintah yang tercermin didalam Pelaksanaan Persediaan Obat Instalasi Farmasi RSUD Waluyo Jati Kraksaan berikut ini adalah analisis atas Kebijakan Pengendalian Internal yaitu:

a. Lingkungan Pengendalian

Penegakan Perilaku dan Nilai Etika sudah Ada PERBUP thn 2015 tentang jenjang nilai pengadaan Barang/jasa (Lihat Lampiran 2) yang ditandatangani Bupati Probolinggo tetapi

tidak dilaksanakan, Penyedia Persediaan Obat menunjukkan adanya penegakan perilaku dan nilai etika telah dilaksanakan dengan baik. Komitmen terhadap kompetensi kinerja pembentukan kepanitiaan oleh Direktur Rumah Sakit serta adanya pemahaman terhadap tugas dan fungsi SPI setelah diadakan persiapan Pelaksanaan Pengadaan Persediaan Obat menunjukkan adanya komitmen terhadap kompetensi yang baik di dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Persediaan Obat.

Kepemimpinan yang kondusif pada kegiatan Rapat persiapan Pengadaan Persediaan Obat sebelum dimulainya Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa agar Rencana Kegiatan dapat Diterima oleh semua Unsur Kepanitiaan menunjukkan bahwa Direktur telah menciptakan Kepemimpinan yang kondusif di lingkungan RSUD Waluyo Jati Kraksaan, Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan yaitu Pembentukan Struktur Pengadaan Persediaan Obat untuk kegiatan Pemilihan Penyedia Persediaan Obat serta PPTK untuk menjadi Pengendali Pelaksanaan Pembayaran Persediaan Obat sesuai dengan kebutuhan. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sasaran penyerahan wewenang oleh Direktur kepada Pejabat Pengadaan untuk menentukan Penyedia Barang dan Jasa dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan Persediaan Obat serta Penyerahan wewenang kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai Pengawas serta Pengendali Pelaksanaan Pembayaran Persediaan Obat Pendelegasian wewenang dan tanggung Jawab yang tepat dalam Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumberdaya manusia Penunjukan/Pembentukan Kepanitiaan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Pengalaman dan Kualifikasi yang dibutuhkan serta Perwujudan peran aparat pengawasan internal pemerintah yang efektif terhadap pengawasan berkala oleh Panitia SPI dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Persediaan Obat menunjukkan adanya perwujudan peran aparat Satuan pengawas internal yang efektif sudah terlaksana dengan baik pada kegiatan persediaan Obat.

b. Penilaian Risiko

Identifikasi Risiko persiapan dan perencanaan yang baik sebelum dilaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang Persediaan Obat oleh SPI menunjukkan bahwa identifikasi atas risiko telah dilakukan dengan baik oleh Rumah Sakit dan Analisis Risiko aktivitas kegiatan Pengendalian yang dilakukan oleh SPI berdasarkan *Time Schedule* sehingga dapat dilakukan penjagaan terhadap standar mutu yang lebih baik terhadap hasil pekerjaan menunjukkan analisis risiko telah dijalankan dalam Kegiatan Pengadaan Persediaan Obat.

c. Kegiatan Pengendalian

Review atas kinerja Instansi Pemerintah terkait oleh Direktur Rumah Sakit terhadap tingkat kinerja staf pelaksana teknik kegiatan berdasarkan laporan kegiatan oleh SPI serta hasil laporan Penyelenggaraan Pengadaan Persediaan Obat oleh Panitia Pengadaan Persediaan Obat menunjukkan bahwa Reviu atas kinerja RSUD Waluyo Jati Kraksaan terkait telah dilakukan dengan baik. Pembinaan Sumber Daya Manusia dibutuhkan pembentukan Kepanitiaan dalam Pelaksanaan Pengadaan Persediaan Obat dan Jasa sesuai dengan Kualifikasi dan Pengalaman terhadap Pelaksanaan Pengadaan Persediaan Obat Menunjukkan bahwa pembinaan sumber daya manusia telah dilaksanakan dengan baik. Namun belum semua anggota Panitia Pengadaan Barang jasa sudah mengikuti diklat pengadaan barang dan jasa dikarenakan belum mendapat giliran untuk diikutsertakan dalam diklat pengadaan barang dan jasa.

Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dibutuhkan petugas yang berwenang dan memiliki akses yang memadai terhadap sumber informasi didalam situs LPSE ataupun sumber

informasi di lingkungan RSUD Waluyo Jati Kraksaan terkait menunjukkan bahwa sudah ada pengendalian atas pengelolaan Kebijakan Pengendalian Internal yang baik, Pengendalian fisik atas aset yang ada di gudang farmasi seperti lembar Kartu Stok, sistem Transaksi input output Obat serta Jaminan Pemeliharaan pada saat pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Persediaan Obat oleh Gudang Farmasi Menunjukkan bahwa telah dilakukan pengendalian fisik yang baik atas aset.

Penetapan *review* atas indikator dan ukuran kinerja Berdasarkan wawancara dengan salah seorang PPTK Kegiatan mengatakan adanya RAB(Rancangan Anggaran Biaya) yang telah ditentukan sebagai ukuran kinerja untuk dibandingkan dengan bobot kemajuan pekerjaan didalam pelaksanaan Pengadaan Persediaan Obat menunjukkan bahwa sudah ada penetapan reviu atas indikator dan ukuran kinerja yang baik dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Persediaan Obat.

Pemisahan Fungsi dengan adanya pembentukan kepanitiaan antara Pejabat Persediaan Obat serta PPTK serta Panitia Penerima Serah Terima Pekerjaan yang telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam Pelaksanaan Pengadaan Persediaan Obat menunjukkan bahwa pemisahan fungsi telah berjalan dengan baik. Otorisasi atas transaksi dan kejadian penting pada seluruh tindakan penandatanganan dokumen SPJ serta Adanya penandatanganan atas laporan yang telah dibuat Distributor oleh PPTK menunjukkan adanya otorisasi atas transaksi dan kejadian penting sudah dilakukan dengan baik serta Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian seluruh aktivitas Instalasi farmasi terkait laporan yang dibuat oleh Penyedia Persediaan Obat yang telah di tandatangani oleh staf PPTK yang berisikan rincian kegiatan, serta situasi dan kondisi di lokasi kegiatan menunjukkan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian telah dilaksanakan dengan baik.

Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatan Surat Tugas terhadap PPTK yang berwenang atas Pelaksanaan Kontrak pada masing-masing lokasi Kegiatan menunjukkan bahwa pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatan telah dilaksanakan dengan baik. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatan peninjauan/inspeksi yang dilakukan oleh PPTK Kegiatan ketika kegiatan berjalan menunjukkan bahwa akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya telah dilaksanakan dengan baik. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting pembuatan Photo Barang terhadap Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Obat dan Penerbitan Dokumen Kontrak oleh Direktur Rumah Sakit serta pembuatan laporan oleh Penyedia persediaan Obat menunjukkan dokumentasi yang baik atas Kebijakan Pengendalian Internal serta transaksi dan kejadian penting sudah dilaksanakan dengan baik.

d. Informasi dan komunikasi

Mengadakan rapat rutin dan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Persediaan Obat yang dilakukan oleh Direktur sehingga Para Anggota Kegiatan mendapatkan informasi yang memadai atas Rencana pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Persediaan Obat menunjukkan bahwa Informasi dan Komunikasi telah dilakukan dengan baik.

e. Pemantauan

Pemantauan dan Pengawasan secara berkala oleh Direktur Rumah Sakit, PPTK, SPI, serta Unit Pengukuran pada pelaksanaan Pengadaan Persediaan Obat hingga berakhirnya masa Pemeliharaan menunjukkan pemantauan telah dilaksanakan dengan baik.

Kendala Penerapan SPIP RSUD Waluyo Jati Kraksaan Ada 6 (enam) kendala yang

ditemukan dalam penerapan SPIP analisis kebijakan pengendalian internal persediaan obat di Instalasi Farmasi RSUD Waluyo Jati Kraksaan yaitu:

- a. Kompetensi SDM belum memadai
- b. Kuantitas SDM belum sesuai dengan kebutuhan organisasi
- c. Terbatasnya anggaran
- d. Kurangnya kepatuhan
- e. Belum maksimalnya kegiatan evaluasi dan dokumentasi
- f. Terdapat kegiatan yang belum didukung dengan Standar Prosedur Operasional (SPO).

upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penerapan SPIP analisis kebijakan pengendalian internal persediaan obat di Instalasi Farmasi RSUD Waluyo Jati Kraksaan melalui SPI yang merupakan Unit Satuan Pengawas Internal RSUD Waluyo Jati Kraksaan dengan kewenangannya melaksanakan fungsi pengawasan internal di RSUD Waluyo Jati Kraksaan yaitu berupa pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan aktivitas RSUD Waluyo Jati Kraksaan secara konsisten terus berupaya melakukan perbaikan untuk mengatasi kendala yang terjadi. Beberapa upaya tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Upaya yang dilakukan terkait yaitu, Skala prioritas diterapkan dalam penyusunan anggaran khususnya terkait dengan Ketersediaan Obat. RSUD Waluyo Jati Kraksaan mengutamakan program dan kegiatan yang sifatnya penting dan mendesak untuk kelancaran pelayanan Obat. Manajemen RSUD Waluyo Jati Kraksaan juga berupaya membangun komunikasi yang efektif dalam mensosialisasikan kebijakan pengendalian Internal atau aturan baru.
- b. Upaya yang dilakukan terkait unsur penilaian risiko, yaitu Direktur RSUD Waluyo Jati Kraksaan mengkomunikasikan kembali dengan seluruh penanggung jawab masing – masing Unit perihal register risiko dan rencana tindak kebijakan pengendalian internal yang telah ada melalui rapat atau focus group discussions (FGD).
- c. Upaya yang dilakukan terkait unsur informasi dan komunikasi, yaitu pendampingan terhadap pengelola kebijakan pengendalian internal persediaan obat di Instalasi Farmasi RSUD Waluyo Jati Kraksaan.
- d. Upaya yang dilakukan terkait unsur pemantauan, dilakukan tindak lanjut atas temuan/reviu atas pelaksanaan kegiatan evaluasi aktivitas Pengendalian Kebijakan Internal.

KESIMPULAN

Kebijakan pengendalian internal persediaan obat Instalasi Farmasi di RSUD RSUD Waluyo Jati Kraksaan telah melaksanakan praktek Kebijakan pengendalian internal dan belum terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas kebijakan pengendalian internal dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Kebijakan pengendalian Internal bertujuan sebagai alat untuk mengawasi proses Kebijakan pengendalian Internal pada persediaan Obat Instalasi farmasi sehingga tujuan Rumah Sakit dapat tercapai.

DAFTAR REFERENSI

- Firman, Fira Fadhilla (2021) *Analisis Pengendalian Internal Sistem Persediaan Obat Pada Rumah Sakit Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar.
- Muchamad Abadi (2015) *Analisis Dasar Hukum, Kebijakan, Dan Peraturan Penanganan Obat Overstock Di Upt Farmasi Dan Alat Kesehatan Kota Yogyakarta*. Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Gadjah Mada.

-
- Puja Latifah Hadina (2020) *Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Persediaan Farmasi (Studi Pada RSUD Sijunjung)*. Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.
- Republik Indonesia (2015). Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor :13 tahun 2015 tentang *jenjang nilai pengadaan barang/jasa pada rumah sakit umum daerah waluyo jati kraksaan sebagai perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan daerah badan layanan umum daerah (BLUD) di kabupaten probolinggo*, Probolinggo : Bupati Kabupaten Probolinggo.
- Republik Indonesia (2021). Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 19 tahun 2021 *kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit organisasi besifat khusus rumah sakit umum daerah waluyo jati kraksaan pada dinas kesehatan kabupaten probolinggo*. Probolinggo : Bupati Kabupaten Probolinggo.
- Republik Indonesia (2021). Uraian tugas Direktur RSUD Waluyo jati kraksaan Nomor 800/80/426.301/2020 *tentang teknis kefarmasian pengelolaan perbekalan kefarmasian*. Probolinggo : Direktur RSUD Waluyo jati kraksaan
- Rini Nuryanti (2018). *Analisis Peranan Pengendalian Internal Persediaan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Persediaan Obat-Obatan Studi Kasus Rumah Sakit Jasa Kartini Tasikmalaya*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Yuliandes (2018). *Analisis Pengendalian Internal Atas Persediaan Obat*. Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.